

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu pemilik (*principal*) dan manajemen (*agen*). Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan (Oktadella, 2011).

Dengan adanya perkembangan perusahaan yang semakin besar maka sering terjadi konflik antara prinsipal dalam hal ini adalah para pemegang saham (*investor*) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (*direksi*). Agen dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).

Masalah keagenan muncul ditandai dengan adanya konflik kepentingan antara harapan investor (memperoleh *return* maksimal) dan harapan para manajer. Agen (manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Manajer secara lebih luas dapat menguasai informasi (*moral hazard*), sehingga manajer berusaha bertindak atas penguasaan informasi untuk kemakmurannya (meningkatkan/menurunkan kinerja) dengan mengabaikan kemakmuran pemilik (Rahim, 2013).

Adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan kecurangan dengan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri (Putra, 2012). Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance* (Putra, 2012).

2.2 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian (Nicolin, 2013). Banyak praktik-praktik akuntansi dan pelaporan memerlukan pertimbangan disebabkan kejadian ekonomi dimasa mendatang yang tidak pasti (Nicolin, 2013). Konservatisme identik dengan laporan keuangan yang *understate* yang risikonya lebih kecil daripada laporan keuangan yang *overstate*. Konservatisme sebagai kecenderungan seorang akuntan yang membutuhkan suatu tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui berita-berita baik sebagai hal yang menguntungkan dibandingkan dengan mengakui berita buruk sebagai hal yang merugikan (Dewi, 2016).

Konservatisme berusaha memverifikasikan hal-hal yang mengakibatkan kerugian lebih cepat dibandingkan keuntungan, dilakukan dalam beberapa alasan seperti yang diungkapkan oleh (Dewi, 2016) bahwa:

- a. Kecenderungan untuk bersikap pesimis bagi para manajer dan pemilik sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan relative dapat dikurangi.
- b. Laba dan penilaian yang dinyatakan terlalu tinggi lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya daripada penyajian yang bersifat *understatement* dikarenakan resiko untuk menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melaporkan hal yang tidak benar menjadi lebih besar.
- c. Akuntan pada kenyataannya lebih mampu memperoleh informasi yang lebih banyak dibandingkan mampu mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin yang dapat dikomunikasikan kepada para investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi dua macam resiko yaitu bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan resiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

Prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme, jika ada ketidakpastian tentang kerugian, Anda harus cenderung mencatat kerugian. Sebaliknya, jika ada ketidakpastian tentang keuntungan, Anda tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan keuntungan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset yang lebih rendah demi untuk berjaga-jaga. Prinsip konservatisme juga dapat diterapkan dalam membuat perkiraan. Misalnya, jika bagian penagihan piutang yakin bahwa sekelompok piutang akan memiliki 3% piutang tidak tertagih, namun bagian penjualan cenderung yakin pada angka 5% lebih tinggi karena situasi penjualan industri yang lesu, angka 5% yang diambil saat membuat penyisihan piutang ragu-ragu, kecuali ada bukti kuat untuk sebaliknya (Savitri, 2016).

Dan terdapat banyak pro kontra yang terjadi ketika kita membicarakan konservatisme. Konservatisme dianggap menjadi suatu prinsip yang justru membuat informasi suatu laporan keuangan menjadi bias karena konservatisme pada dasarnya mengakui rugi lebih cepat dan laba lebih lambat. Hal ini akan membuat suatu laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Di sisi lain, konservatisme dianggap perlu untuk digunakan untuk mencegah kecenderungan manajemen dalam menilai aset perusahaan secara *overstated* agar kinerjanya dinilai baik dan harga saham perusahaan dapat meningkat. Konservatisme juga dianggap bias menyelesaikan masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan dimana masing masing agen akan berusaha untuk memenuhi kepentingannya (Aristiya dan Budiharta, 2014).

Belum selesai dibicarakan mengenai prinsip konservatisme sebagai prinsip yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan atau tidak, muncul sebuah tema baru mengenai konservatisme. Beberapa tahun terakhir banyak dibicarakan mengenai perubahan standar akuntansi yang menjadi pedoman praktik akuntansi di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang sebagian masih mengacu pada *United State Generally Accepted Accounting Principles* (US GAAP) menjadi *International Financial Reporting Standard* (IFRS). Sebenarnya sejak tahun 1994 sebagian PSAK sudah mengacu pada *International Accounting Standard* (IAS) atau sekarang kita kenal sebagai IFRS, tetapi ada juga yang masih mengacu pada US GAAP. Pada tahun 2006, Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam *The Group of Twenty* (G20) memulai wacananya dalam melakukan konvergensi IFRS ke dalam standar akuntansi yang sudah berlaku sebelumnya. Tujuan penggunaan IFRS adalah untuk membuat laporan keuangan di semua negara mengacu pada suatu standar utama yang sama agar pada akhirnya sebuah laporan keuangan bersifat dapat diperbandingkan dengan penggunaan acuan standar yang sama tersebut. Tujuan tersebut juga menjadi alasan bagi Indonesia untuk mengadopsi IFRS. Dengan diadopsinya IFRS, laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia pun akan menjadi dapat diperbandingkan dan dapat diterima secara umum oleh negara-negara lain

sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan investor asing yang mungkin disebabkan karena perbedaan standar yang diacu (Aristiya dan Budiharta, 2014).

Konservatisme seperti pada mulanya selalu menjadi topik yang menjadi perdebatan. Jika pada mulanya pro kontra yang terjadi adalah mengenai dampak positif dan negatif dari prinsip konservatisme ini, sekarang setelah konvergensi IFRS di Indonesia, ada yang menganggap bahwa prinsip ini telah hilang dan ada juga yang menganggap bahwa konservatisme masih ada bahkan meningkat levelnya dalam laporan keuangan setelah SAK mengadopsi IFRS. IASB mengatakan bahwa sebenarnya baik *prudence* maupun konservatisme bukanlah kualitas informasi akuntansi yang diinginkan sehingga mereka menciptakan IFRS dengan harapan laporan keuangan dapat menjadi relevan dan andal. Namun, pada kenyataannya perusahaan-perusahaan tetap harus berhadapan dengan “ketidakpastian” ditengah era IFRS. Hal yang dianggap baik untuk mengatasi ketidakpastian tersebut adalah dengan menganut prinsip konservatisme pada level yang tepat dalam laporan keuangan (Aristiya dan Budiharta, 2014).

Penelitian Balsari (2010) yang berjudul “*Earnings Conservatism In Pre- And Post- IFRS Periods In Turkey : Panel Data Evidence ON The Firm Spesific Factors*” menyimpulkan bahwa konservatisme justru meningkat setelah adanya konvergensi IFRS di Turki. Penelitian Helman (2007) yang berjudul “*Accounting Conservatism Under IFRS*” menyatakan bahwa konservatisme digunakan sebagai prinsip akuntansi utama di negara-negara seperti Jerman dan Swedia dan konservatisme masih muncul menjadi sebuah konsep yang sering disarankan pada diskusi para praktisi yang berkaitan dengan metode akuntansi dalam suatu item tertentu atau kejadian khusus. Walaupun IASB menyatakan bahwa konservatisme bukan kualitas informasi laporan keuangan yang diinginkan, tetapi dalam hal mengatasi ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, prinsip konservatisme masih sering kali diperlukan, tentu saja dalam level yang tepat. Maka dari itu harus ditentukan suatu level yang tepat dalam sebuah laporan keuangan sehingga

laporan keuangan tersebut tidak terlalu konservatis (Aristiya dan Budiharta, 2014).

Konservatisme jika diaplikasikan secara tepat akan menyediakan pedoman yang rasional karena menyarankan bahwa tidak seharusnya menyajikan angka laba bersih dan aktiva yang terlalu tinggi, sesuai dengan karakteristik *verifiability* dalam penyajian yang jujur (*representational faithfulness*) membutuhkan pengujian lebih dalam pencantuman nilainya. Dengan prinsip ini, apabila akuntan dihadapkan untuk memilih satu di antara dua atau lebih metode akuntansi yang sama-sama diterima atau berlaku umum, maka akuntan harus mengutamakan pilihan yang akan memberikan pengaruh keuntungan yang paling kecil pada ekuitas. Perusahaan memilih untuk tidak dengan segera mengkapitalisasi penelitian dan pengembangan sebagai aktiva tercatat namun sebagai biaya pengembangan dan penelitian (Dewi, 2016).

Walaupun secara konseptual terasa bahwa konservatisme menghasilkan masalah karena konservatisme menyebabkan akuntansi tidak melaporkan *true value* secara tepat, namun pada kenyataannya prinsip ini masih diterapkan oleh para akuntan. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan konservatisme masih layak untuk diterapkan dalam akuntansi. Watts (2003) dalam Savitri (2013) mengungkapkan bahwa konservatisme masih diterapkan karena pengguna masih merasakan benefit dari pelaporan yang konservatif ini. Adanya penerapan konservatisme akan membatasi perilaku opportunistik manajer dan konservatisme merupakan suatu penyeimbang bila terdapat bias manajerial dengan tuntutan verifikasi yang bersifat asimetris sehingga dengan adanya usaha menyeimbangkan antara tindakan opportunistik manajer dengan kewajiban melakukan verifikasi terlebih dahulu akan menyebabkan pelaporan tidak akan bersikap berlebihan namun juga tidak kerendahan (Savitri, 2016).

Di sisi lain, konservatisme dapat meningkatkan nilai perusahaan karena konservatisme membatasi pembayaran kepada pihak manajer ataupun pihak lain

(*shareholders*) yang bersifat oportunistik (alasan *contracting*). Transaksi-transaksi yang menguntungkan pihak di luar perusahaan harus diverifikasi lebih mendalam berdasarkan konsep konservatisme ini sehingga akan mencegah terjadinya hal-hal yang oportunistik. Terkait dengan litigasi atau tuntutan hukum maka litigasi lebih kecil kemungkinannya terjadi bagi perusahaan yang meng *understate net asset* dibanding meng- *over state net asset* (alasan *litigation*). Masalah-masalah hukum yang umumnya menjerat auditor dan perusahaan karena terjadinya kebangkrutan yang merugikan investor umumnya terjadi karena adanya *overstatement* dan bukan *understatement* (Savitri, 2016).

Selain itu investor cenderung bersifat *riskaverse* sehingga *understatement* lebih dirasa aman dibandingkan *overstatement* yang berisiko lebih menyesatkan bagi pengambilan keputusan seorang investor dibandingkan kondisi *under-statement*. Bagi perusahaan yang mampu menghasilkan profit maka pengakuan yang asimetris antara *gains* dan *losses* (menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan beban) akan mengurangi *present value* dari pajak menunda pembayaran pajak dan meningkatkan nilai perusahaan (Savitri, 2016).

Penentu standar akuntansi dan otoritas regulator juga diuntungkan dengan lebih sedikitnya kemungkinan datangnya kritik karena terjadinya perusahaan yang melakukan *overstate* nilai *net asset* dibandingkan bila perusahaan melakukan *understate* dari *net assetnya* (alasan *political cost*). Jadi setidaknya bagi para pengambil keputusan yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan maka isi dari laporan keuangan yang *understated* dirasa lebih menguntungkan karena mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bila laporan keuangan dilaporkan secara *overstatement*. Dengan demikian tampaknya pengguna laporan keuangan lebih nyaman dengan terdapatnya konservatisme di dalam akuntansi (Savitri, 2016).

Konservatisme tidak memihak pihak tertentu, tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis semata bagi beberapa pihak. Bahwa dengan pelaporan yang

konservatif lebih transparan dan tidak ada yang dimanipulasi terutama ketika dikaitkan dengan nilai kontrak antara manajemen dengan investor. Konservatisme dalam laporan keuangan bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajemen berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak, sehingga baik investor maupun pengguna lain tidak tertipu pada informasi yang tinggi (Dewi, 2016).

Para kreditur mendesak agar laporan keuangan disusun dengan berpedoman pada konsep konservatisme. Maksud utama mereka adalah untuk menetralkan optimisme para usahawan yang terlalu berlebihan dalam melaporkan hasil usahanya. Jika ditinjau lebih jauh ke dalam laporan keuangan, setiap metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan memiliki tingkat konservatisme yang berbeda-beda. Pilihan metode tersebut akan berpengaruh terhadap angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung konsep konservatisme ini akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan tersebut. Penerapan konsep ini juga akan menghasilkan laba yang berfluktuatif, dimana laba yang berfluktuatif akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang (Rahim, 2013).

Konservatisme mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat tersebut dipertimbangkan secara memadai berdasarkan kelengkapan (*completeness*) bukti yang sesuai. Sehingga, pada prinsipnya konservatisme akuntansi diimplementasikan dalam keadaan jika terdapat sesuatu peningkatan aktiva yang belum terealisasi, maka kejadian itu belum bisa diakui. Contoh pertimbangan sehat (*prudence*) dan kehati-hatian dalam konservatisme sering diterapkan pada saat perusahaan memiliki sejumlah piutang, maka perusahaan cenderung memilih untuk mencadangkan sejumlah piutang tak tertagih untuk mengantisipasi piutang yang tidak dapat ditagih di masa mendatang, dan juga tidak segera mengkapitalisasi biaya pengembangan penelitian sebagai aktiva tanpa kepastian. Dengan demikian, aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu

tinggi serta kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Konservatisme akuntansi lebih menekankan pada reliabilitas, yang mana berseberangan dengan prinsip *fair value* yang lebih menekankan pada relevansi (Parsiman, 2015). Konservatisme tidak selalui pengakuan penundaan pendapatan sebelum ada bukti keberadaan dan realisasinya atau membenarkan mengakui kerugian sebelum ada bukti yang memadai bahwa sejumlah kerugian terjadi (Dewi, 2016)

Seperti yang dikutip dari PSAK No.1 tentang *accrual basis* bahwa laporan keuangan yang menggunakan dasar akrual menginformasikan kepada pengguna tidak hanya pada transaksi masa lalu termasuk pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga sejumlah kewajiban untuk membayar kas pada masa depan serta sumber daya yang menggambarkan kas dapat diterima di masa mendatang. Oleh karena itu, pengukuran dengan dasar akrual menyediakan informasi tentang transaksi di masa lalu serta peristiwa lainnya yang sangat berguna bagi pengguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi (IAI, 2015).

Sebagai pengertian bahwa dengan pencatatan akrual maka setiap transaksi dicatat pada saat muncul kewajibannya untuk diakui tanpa memperhitungkan arus kas masuk dan arus kas keluar jadi setiap catatan transaksi secara transparan dicatat sehingga akan dengan mudah menggambarkan bagaimana pada akhirnya sejumlah transaksi tersebut dihasilkan atau dikeluarkan pada saat realisasinya di masa depan (Dewi, 2016). Namun penerapan konservatisme lebih kepada pencegahan (*precaution*) dibandingkan konservatisme mutlak. Pencegahan yang dimaksud adalah tingkat penerapan yang memperhatikan pernyataan di dalam estimasi akuntansi ketika dihadapkan dalam kondisi yang membingungkan di antara memilih beberapa pilihan, baik pendapatan maupun aktiva tidak dilaporkan terlalu tinggi, ataupun beban dan kewajiban tidak terlalu rendah dibandingkan nilai yang seharusnya. Pada umumnya, manajer memiliki kecenderungan dalam menilai aset perusahaan secara *overstated* agar kinerjanya dinilai baik dan harga saham perusahaan dapat meningkat. Tingkat konservatisme dalam laporan keuangan biasanya ditunjukkan dalam nilai aset *understatement* dan kewajiban

overstatement. Laporan keuangan yang menerapkan prinsip konservatisme merupakan salah satu bentuk tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi kemampuan manajer dalam melakukan manipulasi dan *overstated* dalam laporan keuangan). Salah satu caranya dapat diukur dengan menggunakan *accrual measure* yaitu menggunakan *consv_accrual* model Zhang (2007). *Consv_accrual* diperoleh dengan membagi akrual non operasi dengan total aset perusahaan (Haniati *et al*, 2010)

2.3 Good Corporate Governance

Good Coporate Governance adalah seperangkat system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena *good coporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, professional (BTP). Implementasi prinsip-prinsip *good coporate governance* secara konsisten diperushaan akan menarik minat para inverstor, baik domestic maupun asing (Effendi, 2016).

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran–sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Rahim, 2013).

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Korporat pemerintahan yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga efektif mendorong menggunakan sumber daya perusahaan yang lebih efisien (Hardingsih, 2010).

Dalam penelitian ini, secara teori yang terkandung dalam pengukuran struktur *corporate governance* (Dewi, 2016) yaitu :

- a. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi
- b. Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen
- c. Proporsi komisaris independen dalam perusahaan.
- d. Keberadaan auditor internal dalam perusahaan.
- e. Jumlah komite audit dalam perusahaan

2.3.1 Kepemilikan insitusional

Kepemilikan Institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain (Nuraina, 2012). Organisasi memiliki kemampuan untuk bertahan apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalinya. Struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan saham oleh manajerial. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian akan semakin membatasi manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan (Rahim, 2013).

Dan adanya kepemilikan saham oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Institusi pemilik saham diasumsikan lebih memperhatikan dan memahami portofolio investasi mereka sehingga semakin besar kepemilikan institusional dianggap akan meningkatkan motivasi manajer untuk melaporkan laporan keuangan dengan laba yang berkualitas (Mulya, 2014).

2.3.2 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang saham (Imanta *et al*, 2011). Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba

perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula (Rahim, 2013).

Dalam penelitian ini Kepemilikan Manajerial sengaja ditambahkan, karena kepemilikan manajerial berkaitan erat dengan penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan (Yazidah, 2011). Kepemilikan manajerial juga dapat berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan suatu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan konservatisme laporan keuangan. Dimana manajer akan cenderung bertindak dalam kepentingan pemegang saham, antara lain dengan tidak memanipulasi informasi yang tersaji di laporan keuangan (Nicolin, 2013).

2.3.3 Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016). Komisaris independen harus mendorong diterapkannya prinsip dan praktek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada perusahaan di Indonesia. Dengan menambah proporsi komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajemen yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan (Fitriani, 2014)

2.3.4 Audit Internal

Audit internal menurut The Institute of Internal Auditor (2001), didefinisikan sebagai suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (*consulting activity*) yang bernilai tambah (*value added*) dan

meningkatkan operasi perusahaan. Audit Internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang terarah dan sistematis dalam menilai dan mengevaluasi efektivitas manajemen resiko (*risk management*) melalui pengendalian (*control*) dan proses tata kelola yang baik (*good corporate governance*) (Effendi, 2016).

auditor internal yaitu untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi audit internal bagi manajemen perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Yuwono, 2011).

2.3.5 Komite Audit

Komite Audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komasaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan *implementasi* dari *coporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016).

Pemerintah melalui Keputusan Bapepam No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengeluarkan beberapa peraturan bagi perusahaan publik untuk mencapai *good corporate governance* bahwa setiap perusahaan *go public* di Indonesia wajib membentuk komite audit dengan anggota minimal 3 orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan dan dua orang dari luar perusahaan yang independen terhadap perusahaan. Selain independen, surat edaran tersebut juga mensyaratkan bahwa anggota komite audit harus menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Dewi, 2016).

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan konservatisme akuntansidiantaranya adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyudi yati, Nur (2010)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Inversment Opportunity, Price To Book Ratio terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Invesment Opportunity, dan Price To Book Ratio.	Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Price To Book Ratio berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi. Sedangkan Kepemilikan manjerial dan Investment Opportunity tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
2	Faliyanti, Putri. (2010)	Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi Variabel Independen: Komisaris Independen, Keberadaan Audit, Ukuran dewan komisaris, dan Kepemilikan Institusional.	Hasil penelitian menunjukan bahwa Ukuran dewan komisaris secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan Komisaris Independen,

				Keberadaan Audit, dan Kepemilikan Institusional. tidak berpengaruh terhadap konservatisme
3	Yazidah, Izzatul (2011)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi Variabel Independen: Komisaris Independen, Kepemilikan Saham Manajerial, Komite Audit dan Mekanisme Corporate Governanace.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komisaris, kepemilikan saham majerial, dan mekanisme internal <i>corporate governance</i> secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
4	Susanto, Aris (2012)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi Variabel Independen: <i>Komisaris Independen, Kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, dan dewan</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap

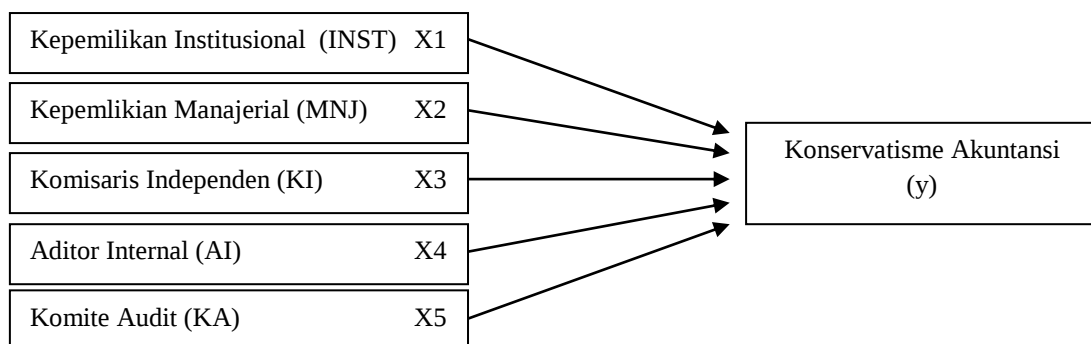
			<i>komisaris.</i>	konservatisme akuntansi. Dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
5	Fahlefi, Reza (2013)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Investment Opportunity, Price To Book Ratio, dan Political Cost terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi Perusahaan Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Investment Opportunity, Price To Book Ratio, dan Political Cost.	Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Kepemilikan manjerial dan Price To Book Ratio berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan Investment Opportunity dan Political Cost tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.
6	Saputra, Hendi (2013)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Investment Opportunity, Price To Book Ratio, dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi Perusahaan Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Investment Opportunity, Price To Book Ratio, dan Leverage.	Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa Kepemilikan manjerial dan Price To Book Ratio berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan Investment Opportunity dan Leverage tidak berpengaruh terhadap

				konservatisme akuntansi.
7	Brilianti, Dinny Prastiwi (2013)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi Perusahaan Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage, dan Komite Audit.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial dan Leverage secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan kepemilikan saham institusional, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
8	Fitriani, Sonia (2014)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi. Variabel Independen: Independen Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan saham institusional, dan komite audit secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

9	Mulya, Anissa Amalia (2014).	Pengaruh Mekanisme Good Coporate Governance (GCG), Audit Brand Name, dan Ukuran Persuahaan. Terhadap Konservatisme Akuntansi.	Variabel Dependen: Konservatisme Akuntansi. Variabel Independen: Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Audit Brand Name, dan Ukuran Prusahaan.	Hasil penelitian menunjukan bahwa Audit Brand Name berpengaruh terhadap Konservatisme Akuntansi. Sedangkan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Konservatisme Akuntansi.
---	------------------------------	---	--	---

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telah teoritis di atas, maka skema kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Konservatisme Akuntansi

Kepemilikan Institusional adalah presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain (Nuraina, 2012). Presentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akuralisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri (Astria, 2011).

Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan dapat meningkatkan konservatisme akuntansi. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan monitoring terhadap perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan (Putra, 2012). Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

2.6.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Konservatisme Akuntansi

Kepemilikan manajerial adalah merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang saham (Imanta et al, 2011). Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Astria, 2011).

Kepemilikan manajerial berperan dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam meningkatkan konservatisme akuntansi. Dengan demikian, manajer pada perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan cenderung memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang benar dan jujur sehingga memiliki konservatisme akuntansi yang tinggi (Astria, 2011). Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

2.6.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Konservatisme Akuntansi

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen (independent commissioner) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (countervailing power) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016).

Komisaris independen dapat menjadi penengah apabila terjadi perselisihan diantara manajer internal dan mengawasi kebijakan-kebijakan manajer serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dengan menambah proporsi komisaris independen, maka perusahaan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan pengawasan terhadap direksi dan manajer yang akan berpengaruh terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan (Fitriani, 2014). Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih baik, karena terdapat badan yang

mengawasi dan melindungi hak-hak diluar perusahaan (Astria, 2011). Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H3: Komisaris independen berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

2.6.4 Pengaruh Audit internal Terhadap Konservatisme Akuntansi

Audit internal menurut The Institute of Internal Auditor (2001), didefinisikan sebagai suatu aktivitas independen dalam menetapkan tujuan dan merancang aktivitas konsultasi (*consulting activity*) yang bernilai tambah (*value added*) dan meningkatkan operasi perusahaan. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang terarah dan sistematis dalam menilai dan mengevaluasi efektivitas manajemen resiko (*risk management*) melalui pengendalian (*control*) dan proses tata kelola yang baik (*good corporate governance*) (Effendi, 2016). Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

H4: Auditor internal berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi

2.6.5 Pengaruh Komite Audit Terhadap Konservatisme Akuntansi

Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016). Dalam hal pelaporan keuangan peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Putra, 2012).

Dengan demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi konservatisme (Astria, 2011). Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H5: Komite audit berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi